MENUJU TELEVISI BERJARINGAN (1)

*Oleh Muzayin Nazaruddin
Staf Pengajar Ilmu Komunikasi UII*

Artikel ini pernah dimuat di Harian Bernas Jogja, 13 Desember 2007

Deadline penerapan sistem berjaringan bagi televisi swasta nasional di Indonesia tinggal menghitung hari: 28 Desember 2007. Dalam waktu yang sempit ini, berbagai kemungkinan bisa ditepiskan karena peristiwa-peristiwa terkait yang telah terjadi mengarah pada satu kepastian: penundaan penerapan sistem berjaringan, atau dalam sebuah eufimisme: pemberlakuan secara bertahap.

Peristiwa penting yang menjadi pertanda adalah pernyataan Menkominfo Mohammad Nuh dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR (Selasa, 4/12/2007) bahwa pihaknya belum dapat melaksanakan dengan penuh penghapusan stasiun televisi swasta nasional dengan alasan keterbatasan waktu. Menurutnya, putusan MK tentang *judicial review* UU Penyiaran baru keluar April 2007 dan diterima Depkominfo pada Agustus 2007. Praktis, menurutnya, Depkominfo baru efektif selama empat bulan menyiapkan pelaksanaan televisi berjaringan.

Sebelumnya, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI di Bali akhir Juli lalu yang diikuti oleh 21 KPID seluruh Indonesia memutuskan bahwa kewajiban membentuk stasiun televisi jaringan bagi stasiun televisi nasional berlaku secara bertahap mulai 28 Desember 2007 hingga 2010.

Beberapa Keputusan Rakornas KPI yang penting disebut di sini diantaranya: 1) Setiap industri televisi swasta yang memiliki siaran secara nasional diwajibkan membentuk induk dan jaringan lokal atau dengan sistem stasiun lokal. 2) Televisi swasta diwajibkan memproduksi program siaran lokal minimal 10% dari total waktu siar. 3) Televisi swasta diwajibkan memberikan kesempatan kepada mitra lokal memiliki saham lebih besar, yaitu 51%. Perlu ditegaskan di sini, aturan tersebut diberlakukan secara bertahap selama tiga tahun (2008-2010).

Menyikapi perkembangan tersebut, tulisan ini bermaksud memberikan beberapa tawaran alternatif agar penundaan untuk ketiga kalinya ini tidak berhenti sebatas 'penundaan', namun benar-benar menjadi 'pemberlakuan secara bertahap'.

Tulisan ini akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan membahas semangat di balik sistem penyiaran lokal atau berjaringan yang ditetapkan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran serta alternatif model siaran berjaringan seperti yang diamatkan UU Penyiaran tersebut. Tulisan kedua akan membahas problem-problem seputar penerapan siaran berjaringan, diakhiri tawaran alternatif dari penulis tentang proses penerapan sistem penyiaran berjaringan.

Semangat Demokratisasi dan Desentralisasi Penyiaran

Yang pertama kali harus dikemukakan adalah bahwa penerapan sistem penyiaran berjaringan mengandung semangat demokratisasi dan desentralisasi di bidang

penyiaran. Semangat ini ditandai dengan *diversity of content* dan *diversity of ownership* yang berangkat dari beberapa argumentasi dasar. *Pertama*, frekuensi adalah milik publik, jadi publik di suatu wilayah tertentu yang berhak mengatur penggunaan frekuensi di wilayah mereka masing-masing. *Kedua*, dahsyatnya pengaruh sosio kultural dari tayangan-tayangan televisi. Sudah teramat banyak penelitian dan penjelasan ilmiah yang menempatkan televisi sebagai aktor utama yang menimbulkan fenomena keterasingan sosial-psikologis, simplifikasi dalam memandang kehidupan, budaya instant, konsumerisme, depresi sosial, dan perubahan-perubahan lain yang cenderung tidak konstruktif. *Ketiga*, konglomerasi media niscaya akan terjadi tanpa ada regulasi yang membatasi (persis seperti yang akhir-akhir ini semakin menggurita di Indonesia). Padahal, konglomerasi dalam 'bisnis informasi dan pengetahuan' mempunyai akibat sangat luas, baik secara sosial, kebudayaan maupun politik.

Dengan *diversity of content* masyarakat mendapat banyak alternatif tontonan. Isi siaran diharapkan semakin dekat, aspiratif, menyentuh kebutuhan, dan memfasilitasi ekspresi politik, sosial dan budaya masyarakat setempat. Selain itu, pengaduan masyarakat mengenai dampak buruk sebuah siaran relatif mudah dilakukan. Harapannya, *local wisdom* dan *local culture* bisa mengemuka dalam industri televisi.

Diversity of ownership melarang monopoli kepemilikan. Share bisnis industri televisi yang selama ini dinikmati pelaku-pelaku industri di Jakarta bisa dibagikan secara lebih adil kepada pelaku-pelaku lokal, baik dalam hal share iklan, produksi program dengan membangun *production house* lokal, atau yang lain.

Kellner (1990) menguraikan bahwa sistem televisi berjaringan telah mendorong partisipasi publik yang sangat luas di berbagai bidang, sistem ini mampu meruntuhkan oligarki pengusaha televisi yang membawa eksekusi besar dalam bisnis dan politik.

Model Penyiaran Berjaringan

Dalam sistem penyiaran berjaringan terdapat dua model yang bisa diterapkan. *Pertama*, mendirikan sistem stasiun berjaringan. *Kedua*, kerjasama jaringan dengan televisi-televisi lokal.

Sistem stasiun berjaringan. Menurut PP No. 50 Tahun 2005 Pasal 34, sistem stasiun berjaringan adalah kerjasama antara stasiun televisi yang menjadi induk jaringan sebagai koordinator jaringan dengan beberapa stasiun televisi lain sebagai anggota jaringan. Anggota jaringan adalah stasiun yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari induk jaringan, anggota jaringan hanya dapat berjaringan dengan satu stasiun induk jaringan dan harus memproduksi dan menyiarkan siaran lokal.

Dalam model ini, badan hukum antara stasiun induk jaringan dengan stasiun anggota jaringan harus berbeda. Jadi, televisi swasta yang akan membentuk stasiun jaringan harus mendirikan badan hukum baru yang terpisah dari induknya. Selain itu, televisi swasta tersebut tentu saja harus menyediakan sarana dan prasarana teknik yang memadai sesuai besar dan jenis program yang akan diproduksi di stasiun anggota jaringan tersebut. Hal lain yang harus diperhatikan adalah pengoptimalan potensi lokal di mana pelaksana produksi lokal dilakukan oleh SDM lokal, khususnya dengan share kepemilikan. Dalam model stasiun jaringan ini *call sign* adalah nama televisi swasta

bersangkutan ditambah nama lokasi setempat, misalnya stasiun induknya adalah Metro TV, stasiun jaringan di Yogyakarta menyebut dirinya Metro TV Yogyakarta.

Kerjasama jaringan dengan televisi-televisi lokal. Sistem televisi berjaringan bisa dilakukan dengan menjalin kerjasama berjaringan antara televisi swasta dengan televisi-televisi lokal yang sudah berdiri.

Dalam model ini, bentuk kerjasama jaringan, jenis dan bidang kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana teknis tergantung hasil kesepakatan kedua belah pihak sejauh tidak bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Aturan yang harus diperhatikan misalnya durasi relai siaran maksimal 90% dari total waktu siaran perhari, tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini, serta hanya berjaringan dengan satu stasiun televisi swasta. Yang harus menjadi semangat dalam kerjasama ini adalah mengembangkan pertumbuhan mitra dan potensi lokal secara sehat.

Kerjasama model ini sebenarnya dapat dilakukan dalam banyak variasi. Salah satu cara yang sudah berhasil dilakukan adalah kerjasama jaringan antar stasiun televisi lokal dimana mereka melakukan kerjasama produksi program lokal secara berseri dan saling merelai program lokal antar televisi lokal.